

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, telah memberlakukan pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.¹

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan yang dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Menghadapi gejolak moneter yang diwarnai dengan tingkat suku bunga tinggi, eksistensi perbankan syariah tidak tergoyahkan, karena perbankan syariah tidak berbasiskan ada bunga.

¹ <http://www.ojk.go.id/bank-syariah> diakses pada tanggal 23 januari 2014 pukul 17.00

Sejak 10 tahun terakhir, bank syari'ah mengalami perkembangan yang sangat signifikan, meskipun secara nasional *market share* bank syari'ah masih rendah dibanding bank konvensional. Dewasa ini, persaingan bank syari'ah semakin ketat baik persaingan antara bank syari'ah atau antara bank syari'ah dan bank konvensional. Hal ini menuntut bank syariah untuk meningkatkan layanan kepada nasabah yang lebih memuaskan. Orientasi nasabah memilih bank saat ini tidak lagi karena jarak antara aktivitas nasabah dan kantor bank, akan tetapi nasabah menginginkan kemudahan dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh bank.²

Per 2009, tercatat sudah enam Bank Umum Syariah (BUS), 25 Unit Usaha Syariah (UUS), 138 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jumlah kantor perbankan syariah sebanyak 1223 yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Untuk dapat mengetahui perkembangan jumlah bank dan kantor perbankan syariah di Indonesia selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNTING DJATI

Table 1.1

Perkembangan Perbankan Syariah

Jenis	2005	2006	2007	2008	2009
Bank Umum Syariah					
• Jumlah Bank	3	3	3	5	6
• Jumlah Kantor	304	349	401	581	711
Unit Usaha Syariah					
• Jumlah Bank*	19	20	26	27	25
• Jumlah Kantor					

² Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri:2013), cet, 2

	154	183	196	241	287
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah					
• Jumlah Bank	92	105	114	131	139
• Jumlah Kantor	92	105	185	202	225
Total Kantor	550	637	882	1024	1223

Ket: * Jumlah bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) Sumber: Bank Indonesia, 2009

Dari table diatas dapat kita lihat bersama pada tahun 2005 sampai dengan 2009 sudah terdapat peningkatan kantor yang signifikan dari tahun ke tahun terutama di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang peningkatannya sangat signifikan dari tahun ke tahunnya. Begitupun dengan saat ini pasti sudah bertambah jumlah angka perkantoran bank Syariah yang ada di Indonesia sampai tahun 2014 ini.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syari'ah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syari'ah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnyayang dilakukan oleh bank syari'ah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syari'ah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam.³

Sejak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dari sisi pembiayaan, akad murabahah lebih mendominasi pembiayaan bank syariah. Pembiayaan akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah di Indonesia saat ini belum memiliki porsi besar sebagaimana pembiayaan dengan

³ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri:2013), cet, 2, hal, 105

akad murabahah. Padahal akad dengan sistem bagi hasil lebih menerapkan prinsip keadilan, sesuai dengan konsep bank syariah. Kenyataannya yang terjadi saat ini adalah pembiayaan nonn PLS (*Profit and Loss Sharing*) yang lebih dominan.

Banyak faktor yang mempengaruhi bank dalam menyalurkan pembiayaannya, baik faktor yang berasal dari internal bank maupun faktor yang berasal dari eksternal bank. Untuk melihat kondisi internal perusahaan, biasanya pihak bank merujuk pada laporan keuangan bank yang di indikasikan dengan berbagai rasio keuangan. Kondisi internal perusahaan dapat dilihat dari beberapa rasio keuangan. Dalam penelitian ini, variabel independen menggunakan factor yang berasal dari internal perusahaan yaitu rasio keuangan bank, ini dimaksudkan untuk kemudahan dalam metode serta kemudahan data. Faktor internal perusahaan juga mempengaruhi jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan.

Pembiayaan, secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.⁴

Pertumbuhan penyaluran pembiayaan dan tingginya tingkat FDR yang melebihi perbankan konvensional merupakan prestasi luar biasa yang dicapai industri perbankan syariah. Tetapi tingginya kedua variabel tersebut juga diikuti tingginya tingkat NPF. Untuk itu diperlukan sebuah evaluasi bagaimana

⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2007), hal 17

ketigavariabel tersebut dapat mempengaruhi laba suatu bank syariah yang merupakan salah satu tujuan didirikannya perusahaan/bank tersebut.

Efektifitas sebuah bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dapat dilihat dari nilai *Loan to Deposit Ratio* (pada bank konvensional) atau nilai *Financing to Deposit Ratio* (pada bank syariah) bank tersebut. Semakin besar nilai *Loan to Deposit Ratio/Financing to deposit Ratio* sebuah bank maka semakin efektif pula bank tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.

Menurut penulis pada saat ini sudah banyak sekali bank syariah yang menawarkan berbagai produk pembiayaan kepada para nasabahnya. Begitu juga bank yang berkaitan dengan pembiayaan, yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. BPRS di berbagai macam daerah baik di perkotaan dan pedalaman daerah sudah mulai menunjukkan profitabilitas yang terus berkembang sesuai dengan porsinya. Tapi dalam realita yang ada justru persaingan antar bank umumnya yang membuat porsi tersebut menjadi tidak rata sesuai yang sudah di putuskan oleh pemerintah, bank yang dimaksud adalah Bank Umum yang mengambil porsi BPRS yang ada saat ini.

Menurut hasil wawancara Yali Supyali sebagai direktur BPRS PNM MENTARI Garut, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Mentari Garut (BPRS PNM Mentari) didirikan pada tahun 1991 oleh beberapa tokoh masyarakat Garut dengan nama PT. BPRS Mentari dan memperoleh izin operasional pada tanggal 28 Januari 1993. Pada tahun 2000 PT. Permodalan Nasional Madani mulai bergabung dengan BPRS Mentari sebagai pemegang saham. Berdasarkan hasil

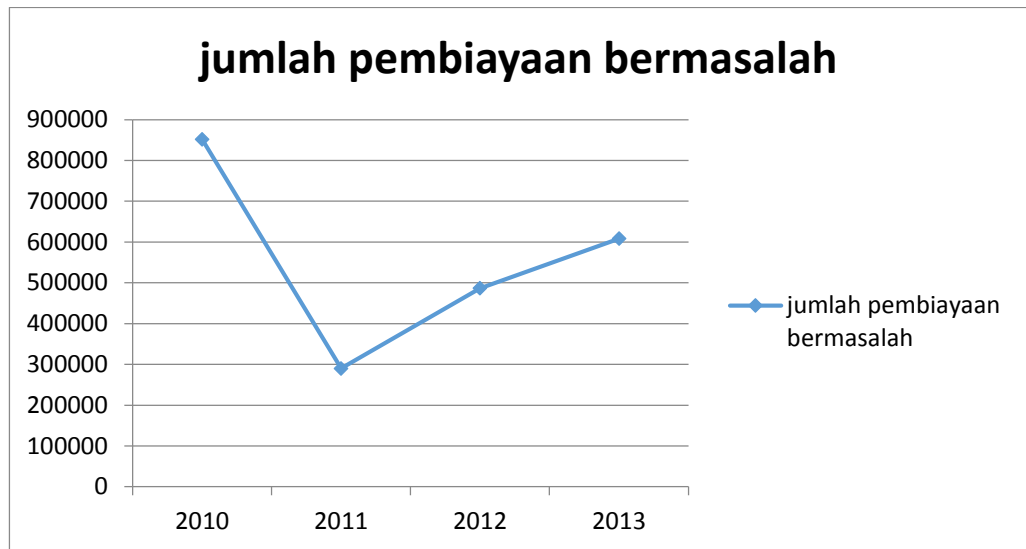
rapat pemegang saham nama PT. BPRS Mentari berubah nama menjadi PT. BPRS PNM Mentari atau disingkat BPRS PNM Mentari. Modal Dasar BPRS PNM Mentari adalah sebesar Rp. 10 miliar sedangkan modal disetor sampai akhir Desember 2010 adalah sebesar Rp. 7.537.160 ribu.

Berdasarkan data keuangan BPRS PNM Mentari Garut tahun 2010-2013, pembiayaan bermasalah (NPF) hanya pada angka 2-4%. Artinya tingkat pengembalian pembiayaan yang disalurkan BPRS dapat dikatakan lancar. Dan yang menjadi indikator lainnya bagi kesehatan bank adalah izin peningkatan pemberian plafond maksimal pembiayaan oleh bank Indonesia sebagai otoritas lembaga perbankan. Terkait besaran maksimal yang boleh diberikan oleh bank kepada perindividu nasabah adalah sebagai berikut:

Table 1.2
Total Pembiayaan bermasalah PT. BPRS PNM MENTARI Garut tahun 2010-2013

Tahun	Nominal
2010	851.460
2011	290.189
2012	486.651
2013	608.208

Sumber: Laporan Keuangan PT. BPRS PNM MENTARI Garut (2014)



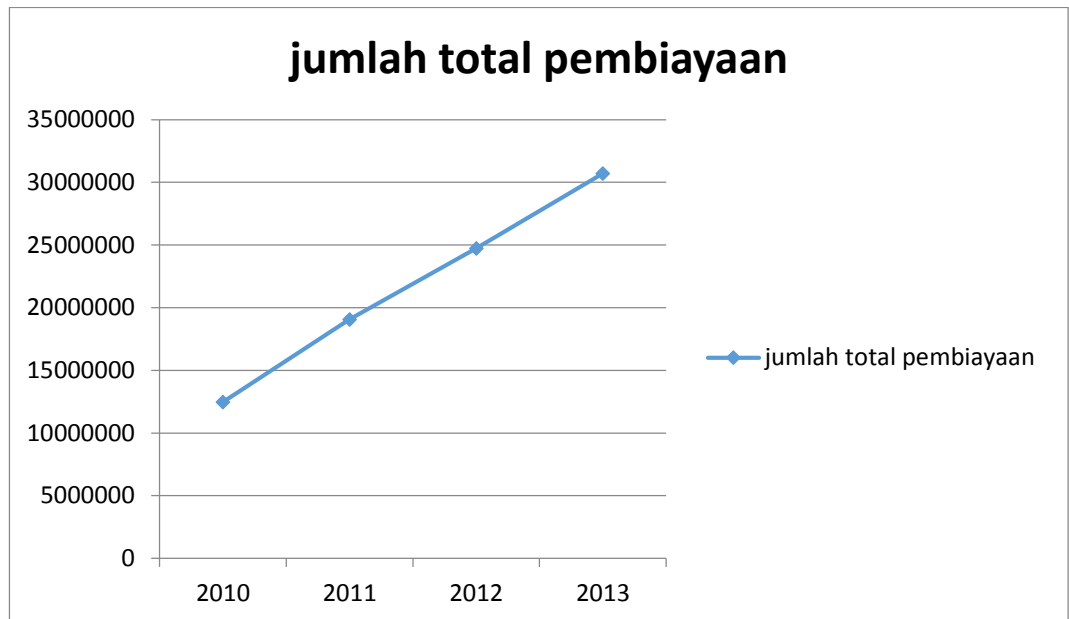
Gambar 1.1
Perkembangan Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan tabel dan gambar diatas perkembangan pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS PNM MENTARI ini mengalami beberapa perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2010 pembiayaan bermasalah PT. BPRS PNM MENTARI membengkak sampai angka 800.000.000 sekian. Dua tahun berikutnya sudah berkurang setengah dari nominal pada tahun sebelumnya. Tahun 2013 mengalami lonjakan sampai 50% dari tahun sebelumnya menjadi 608.208.000.

Tabel 1.3
Total pembiayaan PT. BPRS PNM MENTARI Garut tahun 2010-2013

Tahun	Nominal
2010	12.470.670
2011	19.056.789
2012	24.736.530
2013	30.705.660

Sumber: Laporan Keuangan PT. BPRS PNM MENTARI (2014)



Gambar 1.2
Perkembangan Total Pembiayaan

Berdasarkan laporan keuangan yang ada pada PT. BPRS PNM MENTARI Garut terutama pada total pembiayaan mengalami perkembangan yang signifikan dalam arti lain perkembangan total pembiayaan mengalami peningkatan yang terus melonjak dari tahun ketahun dengan persentase 35% setiap tahunnya. Perkembangan yang signifikan ini ditunjukkan juga dengan nominal yang berawal dari angka 12.470.670 pada tahun 2010 sampai mencapai angka 30.705.660 pada tahun 2013.

Tabel 1.4
Peningkatan maksimal plafon pembiayaan pada individu nasabah tahun 2010-2013

Tahun	Maksimal pembiayaan	Peningkatan dalam (%)
2010	Rp400.000.000,00	
2011	Rp500.000.000,00	25 %
2012	Rp700.000.000,00	40 %
2013	Rp1.000.000.000,00	40,29 %

Sumber: Wawancara dengan staff administrasi BPRS PNM Mentari Garut (2013).

Tabel diatas dipaparkan oleh penulis karena tabel tersebut berkaitan dengan perkembangan pembiayaan PT. BPRS PNM MENTARI Garut, semakin banyak yang melakukan transaksi pembiayaan semakin meningkan juga plafon yang diberikan oleh pihak bank pada para nasabah. Untuk hasil laporan keuangan baik pertahun maupun perbulan sudah diberikan disusun secara sistematis namun penulis tidak diberikan secara lengkap laporan keuanganya dikarenakan ada beberapa pertimbangan dari pihak PT. BPRS PNM MENTARI Garut. Penulis hanya menerima data secara garis besarnya saja mengenai laporan keuangan, diantaranya:

Tabel 1.5
Kondisi keuangan BPRS PNM MENTARI Garut tahun 2010-2013

No	Jenis	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1	Asset	16.322.981	23.856.944	32.331.933	36.571.104
2	Biaya	9.316.689	9.841.278	15.331.330	18.166.308
3	Pendapatan	3.483.966	5.326.696	7.119.489	8.131.620
4	Modal	7.537.160	7.537.160	7.537.160	7.537.160

Sumber: Data hasil penelitian PPL di BPRS PNM MENTARI Garut (2013)

Tentu hal tersebut menjadi masalah yang cukup besar bagi BPRS yang merasa dirugikan. Terutama modal bagi BPRS yang belum tentu bisa menutup segala keperluan yang dibutuhkan oleh Bank tersebut. Banyak BPRS yang kurang dalam masalah permodalan yang ada, apalagi kalau banyak nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Tentu saja itu akan mengganggu profittabilitas dan kinerja yang ada dalam BPRS tersebut. Secara otomatis pihak Bank akan meningkatkan pendekatan yang ekstra terhadap nasabah yang bermasalah, tentu saja pendekatan yang sesuai dengan prinsip syariah yang ada.

Supaya masalah yang dialami oleh bank menjadi lebih ringan. Sedangkan ROE itu sendiri akan terpengaruhi apabila pembiayaan dalam suatu perusahaan perbankan bermasalah. ROE (*Return On Equity*) adalah mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan modal tertentu. Rasio ROE ini merupakan ukuran profitabilitas dilihat dari sudut pandang pemegang saham.

Berdasarkan data diatas penulis berminat untuk menulis skripsi dengan judul “ Pengaruh Rasio NPF (*Non Performing Financing*) dan Rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*) Terhadap ROE (*Return On Equity*) di BPRS PNM MENTARI Garut Periode Tahun 2011-2012”

B. Rumusan Penelitian

1. Bagaimanakah pengaruh NPF terhadap ROE di BPRS PNM MENTARI Garut periode 2010-2013?
2. Bagaimanakah pengaruh FDR terhadap ROE di BPRS PNM MENTARI Garut periode 2010-2013?
3. Bagaimana hubungan antara NPF dan FDR di BPRS PNM MENTARI Garut?
4. Bagaimana pengaruh NPF dan FDR terhadap ROE di BPRS PNM MENTARI Garut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh NPF terhadap ROE di BPRS PNM MENTARI Garut periode 2010-2013.
2. Untuk mengetahui pengaruh FDR terhadap ROE di BPRS PNM MENTARI Garut periode 2010-2013.

3. Untuk mengetahui hubungan antara NPF dan FDR di BPRS PNM MENTARI Garut.
4. Untuk mengetahui pengaruh NPF dan FDR terhadap ROE di BPRS PNM MENTARI Garut periode 2010-2013.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Praktis

Sebagai suatu penelitian terapan, pada dasarnya hasil penelitian ini lebih banyak tertuju pada bidang praktis, dalam hal ini adalah manajemen perbankan syariah untuk dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan langkah dan perencanaan kinerja yang akan dicapai oleh manajemen.

2. Manfaat Akademis

Dapat memberikan sumbangsih keilmuan ekonomi Islam khususnya tentang manajemen keuangan syariah, serta berguna sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Di sisi lain, penelitian ini dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.